

Press Release**“Rente Ekonomi Impor Pangan”**

Jakarta, 17 April 2018

Kantor INDEF

Meskipun julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih ‘perlu’ didatangkan dari luar negeri atau impor. Persoalannya, ketergantungan impor kian bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekedar lonjakan impor gandum yang notabene memang tidak mampu diproduksi di iklim tropis. Namun mulai dari impor Gula, Kedelai, Bawang Putih, Daging, Beras dan yang lain mengalami peningkatan. Bahkan, bahan baku industri Makanan pun lebih dari 60 persen harus dipenuhi dari impor. Sekalipun sampai akhir 2017 neraca perdagangan sektor pertanian masih mencatat surplus, namun hanya karena berkah sektor perkebunan yang surplus mencapai US\$26,7 miliar. Sementara neraca perdagangan tanaman pangan defisit US\$6,23 miliar, Hortikultura defisit US\$1,79 miliar, dan Peternakan defisit US\$ 2,74 miliar.

Artinya, sektor pangan bukannya semakin menuju pada kemandirian, justru semakin menyandarkan kecukupan pasokan pangan dari impor. Upaya menjaga stabilitas harga pangan lebih didominasi kebijakan importasi, dibanding implementasi strategi pembangunan pertanian menuju bangsa mandiri pangan. Jika kebijakan impor pangan ini tak bisa diminimalkan, entah kapan cita-cita kemandirian pangan bisa direalisasikan. Berikut sejumlah catatan kritis INDEF dan masukan bagi pembuat kebijakan agar rente ekonomi impor pangan bisa segera dihentikan..

1. Rendahnya validitas data membuat *rent seeker* merajalela.

- Sembilan temuan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan secara gamblang menggambarkan rendahnya validitas data pangan, minimnya koordinasi dan integrasi data lintas kementerian, serta ketidakpatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kesemuanya tersebut yang pada akhirnya berimplikasi pada suburnya pemburu rente dalam impor pangan. Dipicu oleh karut-marut data pangan dan disparitas harga internasional Vs. Lokal yang menggiurkan, membuat pemburu rente merajalela mampu memanfaatkan berbagai celah yang ada.

2. Harga pangan bergejolak, kemiskinan dapat melonjak

- Stabilitas harga pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
- Setidaknya terdapat dua alasan yakni: pertama, pangan menjadi porsi terbesar dalam pengeluaran mayoritas rumah tangga di Indonesia, terutama rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin. Kedua, volatilitas harga pangan yang tinggi.
- Kedua hal tersebut menjadikan komponen pangan menjadi penyumbang besar dalam pembentukan inflasi di Indonesia sehingga stabilitasnya wajib dijaga. Porsi pengeluaran pangan rumah tangga miskin dan hampir miskin yang besar menjadikan volatilitas harga pangan berdampak pada daya beli mereka. Kenaikan harga pangan akan dengan mudah melempar rumah tangga hampir miskin menjadi rumah tangga miskin.

3. Impor molor, stabilitas harga kendor.

- Tingginya kontribusi dan peran stabilitas harga pangan tersebut, yang terpenting mestinya upaya secara serius dan komprehensif untuk memaksimalkan peningkatan produktivitas di dalam negeri. Sayangnya bertahun-tahun yang mengemuka hanyalah kontroversi penetapan kebijakan impor diantara kementerian teknis terkait.
- Akhirnya, acap kali pemerintah justru melakukan kebijakan impor pangan di saat yang tidak tepat atau pun eksekusi yang sangat lambat. Sekadar contoh impor beras misalnya, kebijakan impor beras tidak efektif menjaga

stabilitas harga karena *timing* impor yang terlambat yaitu ketika harga sudah melambung, baru dilakukan keputusan untuk impor. Pada 2017, impor dilakukan pada November 2017 yang seharusnya pada Juli 2017.

- Hal yang sama terjadi pada gula, kebijakan impor *raw sugar* tidak efektif menjaga stabilitas harga karena *timing* impor serta struktur pasar impor yang terbatas pada beberapa importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT) saja, sehingga potensial menimbulkan *moral hazard* dan berpotensi memunculkan para *rent seeker*.

4. Mewaspada dan Mitigasi gejolak harga ‘musiman’ secara kongkrit

- Jelang puasa dan lebaran, stabilitas harga pangan mutlak diperlukan. Jamak diketahui bahwa lonjakan harga pangan selalu menjadi ritual tahunan, terutama pada momentum puasa dan lebaran atau hari raya keagamaan.
- Pemerintah perlu mengantisipasi dengan strategi kebijakan yang memadai. Jika operasi pasar hanya sekedar menjadi program dan proyek, maka dapat dipastikan fenomena liarnya harga saat hari raya tidak akan terelakkan.
- Instrumen operasi pasar efektif jika mampu mempengaruhi dominasi kepemilikan pasokan dan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (cenderung monopoli). Artinya diperlukan penguasaan cadangan Pemerintah yang memadai.

5. Diversifikasi pangan lamban, harga beras jadi taruhan.

- Meningkatnya konsumsi perkapita beras di Indonesia dibandingkan dengan negara lain salah satunya disebabkan oleh upaya diversifikasi pangan di Indonesia yang berjalan lamban. Penyeragaman konsumsi beras di level nasional yang masif dilakukan di era Orde Baru, terlebih setelah capaian

swasembada beras 1984, menjadikan konsumsi diversifikasi pangan lain tenggelam.

- Jagung, sagu dan ubi yang menjadi bagian makanan pokok beberapa masyarakat Indonesia diganti dengan komoditas beras. Hal tersebut berlangsung hampir dua dekade yang menjadikan lokalitas pangan di Indonesia sulit untuk dikembalikan.

6. Inflasi rendah, namun harga pangan tak murah sehingga daya beli rendah.

- Paradoks harga pangan dan inflasi terjadi saat ini, di mana inflasi umum berada dalam kategori rendah, namun harga pangan tidak dapat dikatakan murah. Harga pangan relatif masih tinggi meskipun inflasi dalam kategori terkendali.
- Jika dirunut dalam beberapa tahun terakhir, inflasi headline memang cenderung turun, namun inflasi yang bersumber dari barang bergejolak masih cukup tinggi. Akibatnya daya beli masyarakat menjadi rendah.

7. Kemandirian pangan dimarginalkan, stabilitas Rupiah dipertaruhkan.

- Sudah banyak bukti bahwa negara yang bersungguh-sungguh membangun kemandirian pangan lebih mampu mengendalikan inflasi dan stabilitas mata uang.
- Terus membesarnya impor pangan akan berakibat pada rentannya stabilitas perekonomian, khususnya inflasi dan nilai tukar. Lebih parah lagi, jika ketergantungan impor pangan tidak segera disudahi maka akselerasi pertumbuhan ekonomi kian sulit terealisasi.

8. Liberalisasi pertanian tanpa daya saing.

- Sektor pertanian telah menjadi salah satu fokus dalam liberalisasi perdagangan dunia. Perdagangan internasional untuk produk pertanian, mengharuskan setiap negara mempunyai daya saing dan proteksi pada sektor pertanian. Dalam upaya tersebut terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh produsen, importir dan pemerintah selaku pembuat regulasi.
- Dinamika restriksi *non tariff* semakin berkembang sejalan dengan berkurangnya tariff. Hal ini menimbulkan implikasi yang besar bagi kinerja perdagangan internasional untuk produk pertanian. Sejak Indonesia memutuskan untuk meratifikasi sejumlah FTA, di saat itu pula Indonesia seakan menjadi net importir produk pangan. Di sisi lain, ekspor produk pertanian cukup ‘melempem’, ini dikarenakan daya saing produk pertanian Indonesia tidak mampu menghadapi berbagai kebijakan *Non Tariff Measures* yang berlapis di negara tujuan.
- Rata-rata pertumbuhan impor produk hasil pertanian sepanjang 2007-2017 mencapai 45,89 persen. Puncaknya terjadi pada 2007, dimana impor produk pertanian pernah tumbuh mencapai 394,98 persen. Sementara rata-rata pertumbuhan ekspor produk pertanian dalam periode tersebut hanya mencapai 5,78 persen.
- Tingginya pertumbuhan impor yang jauh di atas pertumbuhan eksportnya menyebabkan neraca perdagangan internasional untuk produk pertanian mengalami defisit sejak 2007. Pada 2017, defisit yang dialami mencapai US\$3,51 miliar, lebih tinggi dari tahun 2015 dan 2016.

Rekomendasi:

1. Antisipasi keterlambatan *timing* impor dengan menerapkan Sistem *Early Warning System (EWS)* sehingga perencanaan dan pelaksanaan antisipatif lebih cepat. Dengan EWS, monitoring untuk harga produk pangan dapat dilakukan sehingga lonjakan harga selama periode tertentu (respon terjadi \pm 3-4 bulan) tidak terjadi. Jangan sampai ijin impor produk pangan dilakukan di saat terjadi ketersediaan *supply domestic* melimpah (panen raya).
2. Melakukan evaluasi sistem penunjukan importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP) yang berpotensi memunculkan praktek oligopoli dan kartel sehingga kembali memunculkan sejenis kegagalan pasar/ inefisiensi pasar, serta perbaikan mekanisme lelang dan tata niaga gula.
3. Upaya yang mutlak dan kongkrit peningkatan produktivitas dan ketersediaan pangan, baik guna pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industry makanan.
4. Perlu membantu dan menunjang pengendalian impor sekaligus memperbaiki neraca perdagangan dan daya saing produk dalam negeri, maka kegiatan impor produk tertentu perlu diperkuat dengan verifikasi fisik barang melalui pengujian standard mutu barang secara cepat dan akurat. Juga memperkuat kebijakan substitusi impor atau mengenakan bea masuk barang impor untuk perlindungan produk pangan dalam negeri.
5. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan impor pangan secara menyeluruh, baik terkait sistem perencanaan, pemberian ijin, formula dan prosedur maupun aturan teknis impor. Termasuk mengevaluasi sistem kuota dalam pemberian dan penunjukan ijin impor.
6. Tingginya ketergantungan terhadap Jawa dalam pasokan bahan makanan jadi dan produk manufaktur, mempunyai dampak terhadap rentannya kenaikan inflasi yang tinggi. Sehingga diperlukan perbaikan perdagangan antar daerah dan antar pulau.

7. Sinergi TPID dengan retailer dan sentra produsen untuk upaya pengendalian harga dan memotong rantai distribusi pangan, serta memperkuat peran Sistem Informasi Harga Komoditi di seluruh provinsi di Indonesia dan setiap daerah harus memperkuat komoditas unggulannya yang diawasi oleh TPID.

8. Kebijakan pangan harus diimbangi dengan kebijakan lainnya (seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang bagus) untuk menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan.

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)